

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berperan sebagai sarana penting dalam membangun dan mengangkat martabat suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan lahir individu-individu yang cerdas, kreatif, serta masyarakat yang berkualitas, yang pada akhirnya menghasilkan bangsa yang unggul dan kompeten. Sistem pendidikan nasional di Indonesia pun telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan demi meningkatkan kualitas dan maknanya. Fenomena globalisasi mengakibatkan perubahan yang mengharuskan kesiapan dari penyelenggaraan pendidikan untuk dapat melakukan pembaharuan (Nuryanta, 2015).

Pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal sehingga dalam rangkaian input, proses, output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kuantitas dan kualitas yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31, yang menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional dijadikan sebagai rujukan bagi setiap lembaga pendidikan untuk merumuskan visi dari lembaga pendidikan maupun tujuan pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan. Peran pendidikan adalah menghilangkan sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan keteringgalan, membimbing anak ke arah suatu tujuan tinggi. Tujuan dari sistem pendidikan

nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan setiap individu sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan turut berperan aktif dalam kemajuan serta pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan. Pendidikan bagi suatu bangsa memegang peranan inti untuk mewujudkan bangsa yang kuat dan beradab. Peran pendidikan bagi suatu bangsa adalah memberi bekal pengetahuan, pengalaman belajar, pelatihan, dan peningkatan peserta didik (Fathoni & Andriani, 2023).

Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong orang tua, maupun para peserta didik berlomba-lomba memilih sekolah terbaik saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setiap awal tahun ajaran, sekolah harus menjalankan kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pokoknya dalam bidang kepesertaan didik, yaitu melaksanakan PPDB dengan tahapan pengumpulan data, seleksi, serta penempatan calon peserta didik ke jenjang pendidikan yang tepat. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jumlah siswa atau daya tampung pada kelas baru.

Menurut Sari et al., (2017) bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses yang utama dalam sistem pendidikan. Kualitas layanan sekolah memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas proses PPDB. Namun, beberapa sekolah masih mengalami kendala dalam meningkatkan kualitas layanan yang dapat mempengaruhi proses PPDB. Sekolah perlu terus berinovasi dalam menyediakan pelayanan maksimal agar dapat menarik minat calon peserta didik dan orang tua mereka. Sekolah dapat mempersiapkan sarana dan prasarana, menyediakan lingkungan yang nyaman, mengubah metode pembelajaran yang menarik dan mencetak prestasi. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pengguna layanan pendidikan tetapi juga memperkuat reputasi sekolah dalam jangka panjang.

Globalisasi dan transformasi sosial yang berkelanjutan mempengaruhi aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Perencanaan manajemen yang tepat diperlukan dalam keadaan seperti ini. Kepala sekolah perlu membuat strategi yang luas dan fleksibel untuk menarik minat peserta didik baru dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu salah satu aspek utama yang perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah manajemen yang bertugas mengoordinasikan seluruh komponen terkait guna mewujudkan tujuan PPDB secara optimal.

Pada dasarnya, kegiatan manajerial merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh seorang manajer, yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen. Dalam konteks lembaga pendidikan, aktivitas manajerial tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan kepala sekolah.. Kepala sekolah memahami fungsi manajemen. Menurut Terry (2005),

manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan, yang dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), hingga pengendalian atau pengawasan (*controlling*).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nasriah dan Putra (2024) yang menyatakan bahwa manajemen kepala sekolah mencakup sejumlah aspek penting, antara lain perencanaan strategis (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Melalui penguasaan aspek-aspek tersebut, kepala sekolah dapat merumuskan tujuan yang terarah, mengelola sumber daya secara optimal, mengimplementasikan rencana secara efektif, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan dalam merancang dan menerapkan strategi yang tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah pendaftar, tetapi juga menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nizarman (2019), yang berjudul “Manajemen Penerimaan Siswa Baru di SMPN 3 Seluma” menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut telah sejalan dengan standar yang ditetapkan, khususnya pada aspek perencanaan (*planning*),, pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pelaporan. Namun, pada aspek monitoring dan evaluasi (*controlling*) pelaksanaannya belum memenuhi standar yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujari (2022), yang yang berjudul “Manajemen Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru” yang menyimpulkan bahwa perencanaan (*planning*), pengorganisasian

(*organizing*) sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan masih menyalahi ketentuan yaitu dengan menambahkan siswa yang telah ditentukan. Begitupun pada tahap evaluasi telah ditemukan kelemahan, meskipun belum ada solusi seperti keterbatasan ruang kelas.

Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), setiap satuan pendidikan seyogyanya mengimplementasikan sistem penerimaan yang selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut berfungsi sebagai acuan sekaligus instrumen pengawasan dalam pelaksanaan PPDB. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk memahami serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dalam penerimaan peserta didik baru. Prinsip-prinsip tersebut meliputi objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan kompetitif (Salsabila Sakinah, 2022).

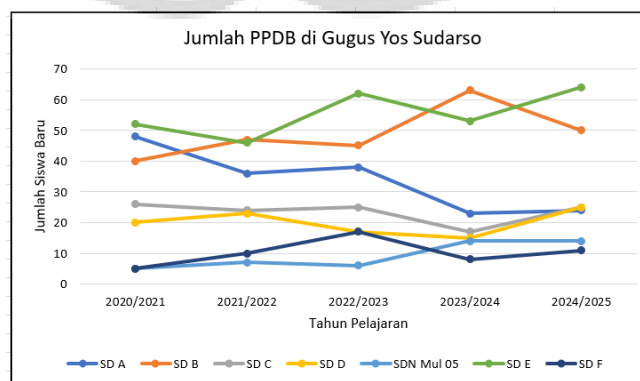
Merujuk pada Pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, telah ditetapkan ketentuan mengenai kapasitas jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), jumlah peserta didik dalam satu kelas minimal sebanyak 20 orang dan maksimal 28 orang. Namun, dalam praktiknya di lapangan, banyak sekolah berlomba-lomba untuk menerima peserta didik baru sebanyak mungkin setiap tahunnya tanpa disertai dengan pengelolaan yang memadai, bahkan sering kali menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan persaingan yang cukup ketat dalam proses penerimaan peserta didik baru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk menghindari penurunan jumlah siswa, seperti yang dikemukakan oleh Pratiwi et al., (2024) bahwa setiap sekolah diharapkan

mempunyai keunggulan (*branding*) agar dapat mempertahankan penerimaan siswa baru.

Terdapat tujuh sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, yang tergabung dalam Gugus Yos Sudarso di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, yang terdiri atas lima sekolah negeri dan dua sekolah swasta. Berdasarkan fenomena yang teridentifikasi di lingkungan SD Gugus Yos Sudarso tersebut, peneliti melakukan pengamatan dan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan manajemen oleh kepala sekolah, khususnya dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kegiatan PPDB dilakukan sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan calon peserta didik sebanyak mungkin. Kurangnya tenaga pendidik juga mempengaruhi metode promosi yang sesuai dengan perkembangan zaman mempengaruhi proses sosialisasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa sekolah yang menerima peserta didik baru melebihi batas kuota yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam jumlah penerimaan siswa baru antar sekolah.

Berdasarkan data perolehan jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru di Gugus Yos Sudarso pada tahun ajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Grafik PPDB Gugus Yos Sudarso T. P. 2020/2021 s.d 2024/2025



Dari grafik di atas, jika dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data PPDB Gugus Yos Sudarso Tahun Pelajaran 2024/2025

=No	Nama Sekolah	Target/ kuota	Jumlah Peserta Didik Baru
1.	SD A	28	24
2.	SD B	28	50
3.	SD C	28	25
4.	SD D	28	25
5.	SDN Mul 05	28	14
6.	SD E	28	11
7.	SD F	28	64

Berdasarkan data dalam tabel dan grafik di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat berkaitan erat dengan implementasi manajemen yang dijalankan oleh kepala sekolah. Implementasi tersebut mencakup tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan atau evaluasi (*controlling*) terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) pada jenjang Sekolah Dasar adalah paling sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang dalam satu kelas.. Di SD A, SD C, SD D sudah memenuhi kuota. Di SD D dan SD E kurang memenuhi kuota, sedangkan di SD B dan SD F melebihi kuota.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peneliti terdorong untuk melaksanakan suatu kajian dengan judul “Analisis Kritis Manajerial Kepala Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SD Gugus Yos Sudarso

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. Manajemen yang dijalankan oleh kepala sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi yang lebih optimal dan efektif guna meningkatkan jumlah peserta didik baru, sekaligus mendukung upaya pengembangan pendidikan yang bermutu di tingkat satuan pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut: Persaingan sekolah yang ketat antara sekolah negeri dan swasta.

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan PPDB dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kelemahan dalam fungsi manajerial kepala sekolah.
3. Rendahnya kualitas layanan dan promosi pendidikan.
4. Kesenjangan jumlah penerimaan siswa antar sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Das dan Halik (2021:70) bahwa kepala sekolah memegang tanggung jawab strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi calon peserta didik. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam aspek perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki peranan yang sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan kualitas kepemimpinan manajerial serta kemampuan

dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat.. Sekolah diharapkan menyusun visi dan misi sekolah serta rencana program yang akan dipaparkan dalam sosialisasi. Sekolah juga harus merancang strategi yang harus dijadikan langkah menuju keberhasilan. Sekolah dapat melakukan promosi dengan cara menunjukkan keunggulan apa saja yang dimiliki, pameran P5, dan kegiatan sosial. Perencanaan (*planning*) juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran dan pemantauan, yang semakin relevan di era digital melalui media sosial.

Kompetensi kepala sekolah dalam mengelola serta mengorganisasikan (*organizing*) proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diwujudkan melalui penyusunan struktur organisasi yang mencakup pembentukan panitia, pembagian tugas secara proporsional, serta koordinasi yang efektif di antara seluruh unsur yang terlibat. Tahapan pengorganisasian ini harus menjamin kelancaran pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan dan adil. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang terlibat mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam aspek pengarahan (*leading*), kepala sekolah berperan dalam memberikan instruksi yang jelas dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB, termasuk panitia, staf administrasi, dan orang tua/wali peserta didik. Namun, pelaksanaan peran ini belum sepenuhnya optimal. Kepala sekolah seharusnya juga berperan sebagai motivator dan fasilitator komunikasi antara pihak sekolah, calon peserta didik, serta orang

tua/wali, guna menjamin implementasi kebijakan PPDB dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Selanjutnya, kepala sekolah melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah. Kepala sekolah memastikan bahwa seluruh tahap pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, transparan, dan adil. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap kinerja panitia, pelaksanaan seleksi, serta dokumentasi yang diperlukan, untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau ketidakberesan yang dapat merugikan pihak manapun.

Efektivitas kompetensi manajerial kepala sekolah dalam mengimplementasikan empat fungsi manajemen utama yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*), merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna mencapai hasil yang optimal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Gugus Yos Sudarso Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana kompetensi manajerial kepala sekolah di SD Gugus Yos Sudarso Majenang Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana efektivitas kompetensi manajerial kepala sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Mendeskripsikan perkembangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Gugus Yos Sudarso Majenang Kabupaten Cilacap
2. Mendeskripsikan kompetensi manajerial kepala sekolah di SD Gugus Yos Sudarso Majenang Kabupaten Cilacap
3. Mendeskripsikan efektivitas kompetensi manajerial kepala sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini nantinya sangat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan, perbaikan, dan peningkatan penerimaan peserta didik baru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam meningkatkan kualitas guru sebagai salah satu kualitas pelayanan sekolah.

b. Untuk sekolah

Diharapkan hasil dari data penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan acuan bahan masukan untuk mempertahankan kualitas layanan yang baik terhadap siswa sehingga dapat meningkatkan jumlah

peserta didik baru dan dapat bersaing dengan lembaga- lembaga pendidikan lainnya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu pendalaman ilmu pengetahuan, terlebih peneliti berkecimpung di dalam dunia pendidikan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan serta sebagai masukan di kemudian hari bila di dalam lembaga pendidikan yang ada terdapat permasalahan yang sama sesuai dengan penelitian ini.

